

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, terhitung Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah sebanyak 10.609.681 jiwa (Badan Pusat Statistik Jakarta, 2021) dari luas wilayah mencapai 661,52 km². Padatnya jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya membuat pemerintah ingin meningkatkan pembangunan, baik sarana maupun prasarana sehingga membuat DKI Jakarta tercatat menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan indeks pembangunan tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 80,77 pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dengan adanya penambahan penduduk yang beriringan dengan meningkatnya indeks pembangunan di Provinsi DKI Jakarta menjadikan kepadatan penduduk sebagai indikator dalam menunjukkan kerentanan suatu tempat dan juga meningkatkan risiko bencana. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia berada di zona pertemuan lempeng bumi dengan iklim tropis basah dan curah tinggi (Widiawaty, 2018). Salah satu wilayah yang memiliki risiko sedang hingga tinggi terhadap segala jenis ancaman bencana dan dampak yang terjadi setelahnya adalah provinsi DKI Jakarta, yakni dengan indeks risiko sebesar 62.58 menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (InaRisk, 2022). Menurut Kepala Bidang Operasi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, yaitu Suheri mengatakan bahwa DKI Jakarta termasuk sebagai wilayah rentan terhadap bencana dikarenakan tingginya jumlah populasi penduduk.

Pada hakikatnya, bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun sehingga dapat berbahaya karena terjadi tanpa adanya pemberitahuan. Untuk meminimalisir risiko dari terjadinya bencana, maka setiap orang harus selalu bersikap siaga. Risiko bencana yang ada di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang datang secara tiba-tiba.

Menurut data dari Kajian Economy and Environment Program For Southeast Asia (EEPSEA) menyatakan Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi tingkat risiko

bencana. Pada dasarnya sebagai negara yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim karena hanya memiliki 2 musim, maka Indonesia termasuk termasuk ke dalam 7 negara dari 530 kota yang ada di negara tersebut terhadap perubahan iklim (BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2023). Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan penanggulangan yang terpadu, terorganisir, dan menyeluruh terhadap adanya perubahan iklim dan pembangunan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu lembaga yang memiliki tugas dalam menanggulangi bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sehingga bertanggung jawab kepada Gubernur. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 524 BPBD dengan 34 BPBD Provinsi dan 490 BPBD Kabupaten/Kota yang telah terbentuk untuk menangani bencana (BNPB, 2023). Dalam menjalankan berbagai tupoksi upaya penanggulangan bencana yang adil dan seimbang, maka BPBD DKI Jakarta menetapkan panduan dan instruksi yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB, yaitu pra bencana, tanggap darurat terhadap bencana, dan pasca bencana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, menetapkan standar dan persyaratan untuk penyelenggaraan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya (BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Sebagai lembaga penanggulangan bencana, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai upaya yang dilakukan, yakni dimulai dari membangun kesadaran publik akan bahaya bencana, dilakukannya penggambaran wilayah yang rawan bencana, dilakukannya peninjauan untuk membuat jalur evakuasi, membuat peringatan akan bencana, menciptakan kelompok siaga bencana dan lain sebagainya. Berdasarkan data menurut BPBD DKI Jakarta, sampai pada bulan Juli 2023 telah terjadi beberapa situasi kegawatdaruratan, baik berupa bencana alam maupun non-bencana alam.



Gambar 1. 1 Informasi Data Kebencanaan oleh Tim Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Juli 2023

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta diakses dari <https://bpbd.jakarta.go.id>

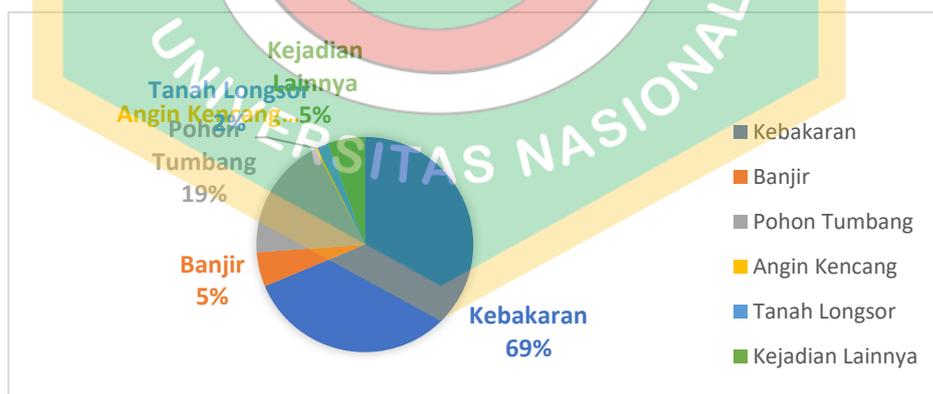
Dalam menjalankan tupoksi sebagai lembaga penanggulangan bencana, maka BPBD Provinsi DKI Jakarta terus berupaya agar dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa akibat bencana yang terjadi, yakni dengan melakukan sinergitas dengan berbagai instansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah), seperti Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Palang Merah Indonesia (PMI) dan Polda Metro Jaya. Adanya sinergitas dengan instansi terkait tersebut dapat disebut juga sebagai suatu program multisektoral yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan kepentingannya masing-masing dalam situasi kegawatdaruratan, salah satunya adalah kebakaran. Untuk itu, salah satu instansi yang melakukan sinergitas dengan BPBD DKI Jakarta dalam penelitian ini adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, khususnya Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Timur.

Alasan dipilihnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai instansi atau mitra yang melakukan sinergitas dengan BPBD DKI Jakarta adalah dikarenakan kebakaran merupakan salah satu bencana dan situasi darurat dengan resiko paling tinggi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya bentuk sinergitas yang dilakukan BPBD DKI Jakarta bersama dengan Dinas

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan dapat mengurangi kejadian kebakaran yang marak terjadi dengan jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, penelitian ini menekankan pada aspek darurat kebakaran yang kerap meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan definisi Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), kebakaran merupakan keadaan dimana suatu bangunan, seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lainnya diamuk oleh api sehingga menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian (BNPB, 2023). Kebakaran sangat rawan menyebabkan kematian, kerusakan harta benda, dan menelan korban jiwa dengan jumlah yang sangat besar apabila tidak segera dilakukan penanganan dengan cepat, baik di tengah lingkungan pemukiman padat penduduk maupun di hutan dan lahan yang tersedia.

Menurut artikel yang dilansir oleh Kompas.com, sebanyak 1.258 kejadian bencana telah terjadi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 dengan angka tertinggi adalah bencana kebakaran, yakni sebanyak 864 kasus (69%). Selain bencana kebakaran juga terdapat beberapa bencana lainnya yang terjadi, yakni pohon tumbang sebanyak 234 kasus (19%), banjir sebanyak 65 kasus (5%), tanah longsor sebanyak 22 kasus (2%), angin kencang sebanyak 4 kasus (0%), dan kejadian luar biasa seperti runtuhnya bangunan, kejadian tenggelam, wabah penyakit, dan lain sebagainya sebanyak 69 kasus (5%) (Sutrisna, 2024).



Gambar 1. 2 Data Infografis Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/25/11385211/bpbd-dki-1258-bencana-terjadi-di-jakarta-sepanjang-2023-paling-banyak#google_vignette

Berdasarkan pernyataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, yaitu selain disebabkan oleh banyak permukiman warga berhimpitan, kebakaran juga dapat disebabkan oleh arus pendek listrik atau kosleting dengan persentase kejadian sebanyak 90% kasus kebakaran. Dari data tersebut, BPBD DKI Jakarta juga mengungkapkan bahwa sekitar ± 1.000 kasus kebakaran telah terjadi di Provinsi DKI Jakarta sejak bulan Januari hingga September 2023 (ANTARA News, 2023). Di samping itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga menyampaikan data yang menunjukkan bahwa pada bulan Januari – Desember 2023, jumlah kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta berjumlah 864 kejadian kebakaran. Akan tetapi, jumlah perhitungan oleh BPBD DKI Jakarta dengan Dinas Gulkarmat memiliki perbedaan, yakni Gulkarmat mencatat bahwa terdapat 2.286 kejadian kebakaran sepanjang tahun 2023.

Tabel 1. 1 Data Infografis Kejadian Kebakaran Sepanjang Tahun 2023

No.	Kota Administrasi	Jumlah Lokasi Kebakaran
1.	Jakarta Pusat	110 Kejadian
2.	Jakarta Utara	157 Kejadian
3.	Jakarta Barat	205 Kejadian
4.	Jakarta Selatan	162 Kejadian
5.	Jakarta Timur	223 Kejadian
6.	Kepulauan Seribu	5 Kejadian
	Total	864 Kejadian

Sumber: Infografis BPBD DKI Jakarta 2023

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kota Jakarta Timur memiliki kasus atau kejadian kebakaran paling banyak diantara kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 223 kejadian. Pada tahun 2017 dengan periode bulan Januari – November, kota Jakarta Timur juga menjadi kota yang memiliki angka kasus kebakaran tertinggi, yakni sebanyak 392 kasus dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 217 kasus kebakaran terjadi.

Secara umum dibandingkan dengan daerah lain di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur memiliki populasi tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlahnya mencapai 3,05 juta jiwa dari total keseluruhan 10,60 juta jiwa (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021). Adanya peningkatan jumlah populasi di Kota Jakarta Timur menyebabkan konsekuensi buruk, terutama yang berkaitan dengan masalah

kepadatan penduduk permukiman juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan di wilayah pemukiman Kota Jakarta Timur.

Salah satu kecamatan di Jakarta Timur yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi adalah Kecamatan Cakung. Dengan luas wilayahnya yang mencapai 42,28 km² menunjukkan bahwa kecamatan cakung memiliki kondisi lingkungan permukiman yang kumuh dan padat karena faktor lingkungan dengan bahan pembuatan pemukimannya banyak berasal dari material semi permanen kayu yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Di samping itu terjadinya fenomena El Nino pada pertengahan tahun 2023 menyebabkan sejumlah lokasi di Indonesia, terutama di Kota Jakarta Timur dilanda cuaca panas yang ekstrem dan kering yang membuat datangnya musim hujan menjadi lambat dapat mendorong terjadinya kebakaran.

Akibat meningkatnya angka terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik tersebut, maka BPBD Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan bersinergi melakukan operasi pemeriksaan instalasi listrik, Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), pemeriksaan kompor regulator dan selang kompor gas, dan lain sebagainya di kawasan permukiman rumah warga untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di kawasan gedung dan permukiman di Jakarta. Selain BPBD DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, pelaksanaan operasi tersebut juga melibatkan beberapa instansi terkait lainnya, seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Satpol PP, Wali Kota, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, dan lain sebagainya (Frans, 2023). Tambahan pula, BPBD DKI Jakarta juga bekerja sama dengan bagian dunia usaha untuk melakukan operasi pemeriksaan instalasi listrik.

Sebagai bentuk menjalin sinergitas terkait kebakaran, maka BPBD DKI Jakarta bersama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memanfaatkan layanan *call center* Jakarta Siaga 112 sebagai layanan tanggap darurat dalam menanggulangi bencana atau situasi kegawatdaruratan yang terjadi. layanan *call center* Jakarta Siaga 112 merupakan layanan bentuk kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama dengan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta. Layanan tersebut dilaksanakan oleh BPBD selaku pelaksana yang bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang operasional layanan dengan bantuan dari Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai Ketua Pelaksana Layanan Jakarta Siaga 112 dalam menjalankan tugasnya (Putri, 2020).

Di samping itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti bentuk sinergitas antara BPBD dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan memanfaatkan layanan nomor 112 karena di antara kedua instansi tersebut ingin memberikan penanganan dengan cepat sesuai dengan prosedur pelaksanaan dasar petugas dengan waktu sekitar 15 menit setelah laporan masuk yang diperlukan untuk petugas sampai di lokasi (Itah, 2019). Dengan mengandalkan layanan *call center* Jakarta Siaga 112 yang beroperasi setiap hari secara gratis dan bisa dilakukan dengan ponsel tanpa *SIM Card* yang tetap memperhatikan jangkauan sinyal layanan operator, maka diharapkan pemadaman dan penanganan situasi kebakaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Terdapat beberapa hal yang mendasari penelitian terkait sinergitas ini adalah karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan penanganan pemerintah dalam situasi kegawatdaruratan cenderung lambat, terlalu banyak nomor pengaduan darurat yang berbeda-beda dari setiap dinas atau instansi, dan alur birokrasi yang ada dalam pemerintahan cenderung berbelit-belit walaupun di tengah situasi darurat. Dibalik adanya keluhan tersebut, korban-korban yang terdampak dalam situasi kegawatdaruratan yang seharusnya bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan menjadi harus menunggu petugas terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan, sehingga jumlah korban yang tadinya tidak ada atau bahkan bisa ditekan jumlahnya menjadi bertambah. Untuk itu, hal tersebut yang membuat BPBD DKI Jakarta melaksanakan layanan telepon darurat dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kegawatdaruratan serta memudahkan BPBD dan juga instansi terkait lainnya dalam menerima laporan terjadinya situasi kegawatdaruratan, salah satunya kebakaran untuk segera ditangani.

Untuk menampung segala keluhan dari masyarakat terkait dengan kebakaran, maka BPBD DKI Jakarta mendirikan tenda posko pengaduan kebakaran yang berguna dalam memberikan bantuan berupa pertolongan bagi masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga mengadakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk membantu mengembalikan kesehatan mental para korban yang terdampak kebakaran dan juga menjalin koneksi ke sumber bantuan lain. Kemudian, BPBD Provinsi DKI Jakarta juga menempatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 di setiap kelurahan di wilayah Jakarta untuk mengetahui tingkat kemungkinan bencana di wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko dan menjaga keselamatan masyarakat. Penempatan Tim Reaksi Cepat (TRC) juga dilakukan sebagai bentuk sinergitas untuk membangun budaya sadar bencana dan juga dilakukan sebagai bentuk sosialisasi layanan Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat (Saragih, 2022).

Dibalik upaya sinergitas yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta bersama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menangani kebakaran, tetapi terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tindakan penanganan menjadi terlambat, yakni disebabkan situasi kemacetan lalu lintas yang membuat petugas menjadi terhambat menuju lokasi, adanya masyarakat yang egois mencegah akses jalan kendaraan operasional petugas, dan terdapat beberapa lokasi kebakaran jauh dan sulit dijangkau dari pelayanan pos kebakaran. Untuk itu, selain dibutuhkan partisipasi instansi terkait dalam menanggulangi kebakaran, maka perlu diperhatikan juga partisipasi masyarakat dengan bersiap-siaga dalam mencegah dan mengendalikan terjadinya kebakaran. Hal tersebut dikarenakan menurut data laporan Fajar Septian dkk. (2021) dalam upaya memadamkan kebakaran yang terjadi menunjukkan bahwa antisipasi masyarakat untuk memadamkan kebakaran di Kota Jakarta Timur pada tahun 2020 hanya sebesar 66 kejadian atau 19% sedangkan antisipasi pemerintah dalam memadamkan kebakaran sebesar 283 kejadian atau 81% (Septian, 2021).

Oleh karena itu sebagai bentuk dilakukannya penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membahas terkait sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

DKI Jakarta dan instansi lain, salah satunya adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam menyikapi situasi kebakaran berasal dari laporan yang masuk dari masyarakat dengan memanfaatkan layanan *call center* Jakarta Siaga 112. Selain itu upaya lainnya adalah menyediakan informasi mengenai betapa bahayanya kebakaran dengan melakukan sosialisasi agar dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya bentuk sinergitas di antara kedua instansi tersebut dan juga instansi terkait lainnya dengan memanfaatkan layanan yang telah tersedia diharapkan dapat meminimalisir korban jiwa dan meminimalisir dampak kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran yang sering terjadi di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur tidak terlalu besar sehingga perlu diperhatikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dalam menghadapi darurat kebakaran di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dalam menghadapi darurat kebakaran di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan ilmu dalam ilmu administrasi, khususnya mengenai manajemen bencana yang

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta yakni berkaitan dengan manajemen kebakaran yang kerap terjadi di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Penelitian ini juga dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam memperluas wawasan dan pengetahuan dalam memahami sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dalam menghadapi bahaya darurat kebakaran di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam masalah yang akan diteliti, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk memperluas bentuk sinergitas dengan instansi/lembaga pemerintah lain sebagai suatu upaya untuk menghadapi kegawatdaruratan, khususnya darurat kebakaran di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan kemudahan bagi pembaca untuk melihat serta memahami pembahasan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini secara menyeluruh, maka diperlukan suatu sistematika penulisan sebagai kaidah dalam penulisan penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi. Untuk itu, berikut beberapa sistematika penulisan skripsi penelitian yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan adalah bagian awal dari penulisan skripsi penelitian, yaitu membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk digunakan sebagai referensi atau rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, dan kerangka pemikiran.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian membahas struktur sistematis penulisannya yang berbeda sesuai dengan metode atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data dan informasi dalam penelitian. Untuk itu, penelitian ini membahas pendekatan penelitian, penentuan informan untuk mendapatkan data dan informasi penelitian, teknik pengumpulan data, baik secara observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, serta lokasi dan jadwal penelitian.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan membahas bagaimana peneliti menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian yang telah dilakukan. Untuk itu, dalam bab ini berisi mengenai deskripsi objek dan lokasi penelitian, hasil penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kesimpulan dan saran merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dikumpulkan dan diuraikan oleh penulis. Selain berisi mengenai kesimpulan dan saran, maka dalam bab ini juga mencakup daftar pustaka, lampiran, baik lampiran daftar pedoman wawancara maupun lampiran transkrip wawancara, dokumen penelitian, dan juga biodata dari peneliti.

6. DAFTAR PUSTAKA

